

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena perbudakan semestinya telah terhapuskan sejak lama, namun sekarang fenomena ini masih terjadi atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan *modern slavery*. Menurut hasil konvensi International Labour Organizations (ILO) tentang *Forced Labour* tahun 1939 (no. 29), *modern slavery* adalah semua bentuk pekerjaan atau jasa yang dituntut oleh suatu pihak dengan menggunakan ancaman hukuman dan yang mana orang itu tidak menawarkan dirinya secara sukarela.¹ Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa *modern slavery* itu berbentuk pekerjaan atau jasa yang menerapkan hukuman apabila terjadi kesalahan dan pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan sukarela.

Bentuk praktek *modern slavery* menurut Supplementary Slavery Convention tahun 1956 adalah seperti terikat hutang, pernikahan atas dasar paksaan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak-anak termasuk dalam konflik persenjataan dan juga terlahir atau keturunan dari keluarga yang dahulunya adalah budak.² Di tahun 2018, negara yang dengan angka *modern slavery* tertinggi di dunia adalah Korea Utara, Eritrea, Burundi, Afrika Tengah, Afghanistan dan Mauritania.³ Mauritania adalah negara yang aktif dalam pemberantasan *modern slavery*, dibuktikan dari keaktifannya

1 What is Forced Labour, Modern Slavery and Human Trafficking. Diakses di <https://www.ilo.org/>. diakses 16 Januari 2019

2 Sol Torres and Niklas Swanström. "Slavery and Human Trafficking in 21st Century". Focus Asia: Perspective and Analysis No. 10. Institute for Security and Development. October 2014. Hal 2

3 Data Prevalance Mauritania 2018. Diakses di <https://www.globalslaveryindex.org/>. diakses 16 Januari 2019

di berbagai konvensi dan perjanjian internasional, sedangkan negara-negara lainnya masih belum terlalu aktif dalam penghapusan perbudakan di negaranya.

Mauritania adalah negara Islam yang terletak di bagian barat benua Afrika. Negara ini menjadi perhatian banyak pihak karena Mauritania adalah negara yang terakhir kali menetapkan larangan terhadap perbudakan, yaitu pada tahun 1981. Saat itu penghapusan perbudakan dilakukan dengan pendekatan non-korban, yaitu dengan memberikan kompensasi pada tuan si budak sesuai dengan hukum Syariah.⁴ Berdasarkan data terbaru, terdapat 20% dari populasi Mauritania merupakan korban perbudakan.⁵ Diantaranya adalah kaum *Haratine* dan *Afro-Mauritanian*. Para budak tidak mendapatkan pendidikan, bayaran dan juga kebebasan yang semestinya mereka dapatkan. Para tuan berasal dari keturunan Arab berber atau lebih dikenal sebagai keturunan *Beydan*.⁶ Etnis tertentu di Mauritania sering menjadi korban perbudakan dan juga telah terbentuk kasta-kasta antar masyarakat Mauritania dengan sendirinya. Kasta-kasta di masyarakat Mauritania terbentuk karena penjajahan yang dulu pernah terjadi di Mauritania. Penjajah negara-negara Afrika dulunya memisah-misah etnis yang ada dan menerapkan sistem tingkatan antar etnis.⁷

Perbudakan di Mauritania di mulai sejak abad ke-11, saat itu Mauritania didatangi oleh bangsa Arab dan terus berlanjut saat ekspansi militer Perancis

4 A Look at Mauritania's Troubled History of Slavery. <https://www.unpo.org/>. diakses 16 Januari 2019

5 The Unspeakable Truth about Slavery in Mauritania. Diakses di <https://www.theguardian.com/> . diakses 18 Januari 2019

6 Why Wouldn't Mauritania End Slavery Once and for All. <http://www.face2faceafrica.com/> . diakses 18 Januari 2019

7 Robert Blanton, T. David Mason & Brian Athow. Colonial Style and Post-Colonial Ethnic Conflict in Africa. Journal of Peace Research. Department of Political Science, University of Memphis. Hal 480

dilakukan pada tahun 1854.⁸ Saat Perancis masuk ke Mauritania hubungan antara kedua pihak awalnya adalah hubungan dagang, namun lama kelamaan Perancis mulai memanfaatkan keadaan ini dengan mempraktikkan kolonialisme dan imperialisme.⁹ Akhirnya perdagangan budak mulai sering terjadi di Mauritania. Budak diperjual belikan dengan bebas dan ditukarkan dengan barang seperti minuman alkohol, senjata dan barang-barang yang dibawa oleh orang-orang Eropa saat itu.¹⁰

Status budak kadang bersifat turun temurun dari ibu ke anak dan begitu seterusnya. Seringkali korban tidak tahu bahwa mereka sedang dieksploitasi, karena kebanyakan dari korban tidak mengetahui cara untuk bertahan hidup selain menjadi budak. Selain menjadi tenaga kerja yang tidak dibayar, para budak di Mauritania dipaksa untuk melayani tuannya, pelanggaran HAM seperti pemukulan dan pemerkosaan kerap terjadi. Budak dan anak-anak dapat disewakan, dipinjamkan, atau diberikan sebagai hadiah, karena mereka dianggap seperti barang milik tuannya.¹¹ Bagi budak yang sudah menjadi milik tuannya, tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah, harta warisan keluarga bahkan mas kawin dari pernikahannya sendiri.¹² Perbudakan di Mauritania dimulai sejak para budak masih berusia sangat muda. Mereka mengemban tanggung jawab pekerjaan rumah tangga, seperti untuk

8 A Look at Mauritania's Troubled History of Slavery.

9 Endah Artika Noerilita dan Saiman Pakpahan. Peran Walk Free Foundation (WFF) dalam Mengatasi Modern Slavery di Mauritania. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Hal 21

10 Noerilita. Peran WFF. hal 22

11 Andre Rutti. Constructing a Human Rights Campaign: Contemporary Slavery in Mauritania. *Global Societies Journal*, 5. 2017. Hal 50

12 Walk Free Foundation. *Global Slavery Index* 2018.

mengambil air dari sumur, mengumpulkan kayu bakar, memasak, mencuci pakaian, membersihkan, menjaga anak majikan mereka, membangun dan membongkar tenda.¹³

Berdasarkan laporan Global Slavery Index, *forced labour* dan *forced marriage* memang kerap terjadi di Mauritania, menurut data Global Slavery Index di tahun 2018, diperkirakan ada 90.000 orang di Mauritania yang hidup dalam perbudakan.¹⁴ Tenaga kerja paksa bekerja di berbagai sektor yang berbeda, baik perempuan ataupun laki-laki dari umur dan asal wilayah yang berbeda-beda¹⁵

Di dunia internasional, Mauritania termasuk pihak yang menentang terjadinya segala bentuk perbudakan, seperti keterlibatannya pada the 1926 Slavery Convention and Protocol amending the Slavery Convention, the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery and the Slave Trade, dan Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956. Di kawasan Afrika, Mauritania juga menjadi bagian dari African Charter on Human and People's Right, yang membahas mengenai hak asasi manusia pada pasal ke 5.¹⁶

Mauritania sendiri telah melakukan berbagai upaya penghapusan terhadap perbudakan. Di tahun 1905, dimulai dengan pengadopsian hukum Perancis tahun 1848, yaitu penghapusan perbudakan di seluruh negara jajahan Perancis. Hukum ini terus digunakan sampai pada tahun 1961 di dalam konstitusi Mauritania, ditambahkan dengan prinsip-prinsip yang ada pada Universal Declaration of Human Rights. Ditahun 1980, presiden Mauritania Mohamed Khouna Ould Haidalla mengeluarkan

13 Noerilita. Peran WFF. Hal 27

14 2018. <https://www.globalslaveryindex.org/>. diakses 24 Januari 2019

15 Walk Free Foundation. Global Slavery Index 2018.

16 Rutti. Constructing a Human Rights Campaign. Hal 51

pernyataan menghapus perbudakan, yang kemudian menjadi aturan No. 081–234, namun definisi dari perbudakan itu sendiri masih belum dapat dijelaskan dengan baik. Pada tahun 2007, dilakukan adopsi terhadap the Slavery Act dan dianggap sebagai titik balik praktik perbudakan di Mauritania. Dan pada tahun 2015, majelis nasional merancang undang-undang baru yang memperkuat undang-undang anti perbudakan yang ada dengan mengangkat perbudakan ke status kejahatan terhadap kemanusiaan dan melipat gandakan hukuman bagi pelaku perbudakan tersebut.¹⁷

Upaya yang dilakukan Mauritania ternyata berbanding terbalik dengan sikapnya yang justru bersikap keras terhadap aktivis anti-perbudakan di negaranya, baik aktivis domestik maupun internasional. Bentuk tindakan yang dilakukan adalah seperti melarang dilakukannya demonstrasi damai, melakukan kekerasan terhadap pengunjung rasa, melarang kelompok aktivis dan mengganggu kegiatan yang dilakukan para aktivis.¹⁸ Pemerintah Mauritania juga melakukan penangkapan terhadap aktivis, seperti contohnya terjadi penangkapan terhadap Biram Dah Abeid, ia merupakan inisiator terbentuknya Resurgence of the Abolitionist Movement, yang telah berjuang dalam pembebasan budak-budak di Mauritania.¹⁹ di tahun 2012, ia membakar buku-buku yang berisikan interpretasi hukum Islam yang membenarkan perbudakan. Buku tersebut merupakan sebagian kecil dari warisan perbudakan di Mauritania.²⁰

17 Rutti. Constructing a Human Rights Campaign. Hal 51

18 Mauritania: Growing repression of human rights defenders who denounce discrimination and slavery. <https://www.amnesty.org/> diakses 30 Januari 2019

19 Free Mauritania's Anti-Slavery Activist. <https://www.freedomunited.org/>. diakses 30 Januari 2019

20 The Man Fighting Slavery in Mauritania. <https://borgenproject.org/>. diakses 2 Februari 2019

Ada beberapa aktivis anti-perbudakan internasional yang mendapat penolakan untuk masuk ke Mauritania. Pada bulan September 2017, visa milik delegasi Abolition Institute ditolak masuk ketika saat mereka tiba di Bandara Internasional Nouakchott.²¹ Penolakan tersebut dilakukan karena dinilai menentang hukum Mauritania.²² Pada bulan November, pihak Mauritania juga menolak akses delegasi Amnesty International ke negaranya.²³

Di tahun 2017, pemerintah Mauritania mengusir dua peneliti Perancis yang melakukan penelitian tentang perbudakan.²⁴ Yang terbaru, di tahun 2018, pemerintah mengusir seorang jurnalis keturunan Maroko-Perancis yang tengah melakukan penelitian terhadap perbudakan di Mauritania, pemerintah mencurigai ia memiliki kaitan dengan aktivis Biram Dah Abeid yang sudah ditahan oleh pemerintah.²⁵

Para aktivis yang hendak masuk ke Mauritania memiliki misi untuk pemberantasan perbudakan di Mauritania, seperti para aktivis dari Abolition Institute yang telah merencanakan perjalanan selama satu minggu di Mauritania untuk mempelajari dan meneliti bagaimana perbudakan di negara tersebut.²⁶ Abolition Institute adalah organisasi aktivis anti perbudakan asal Amerika Serikat yang memang

21 Timeline: Crackdown on Anti-Slavery Movement in Mauritania Continues after Release of Biram Dah Abeid. <https://unpo.org/article/>. Diakses 2 Februari 2019

22 Why Wouldn't Mauritania.

23 Mauritania 2017/2018. <https://www.amnesty.org/> diakses 2 Februari 2019

24 Mauritania 2017 Human Rights Report. Country Reports on Human Rights Practices for 2017. United States Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. Hal 16

25 Mauritania Continues Crackdown on Anti-Slavery Journalism and Activist. <http://www.mfwa.org/>

26 Mauritania bars US activists from entering the country. <https://www.antislavery.org/>. diakses 2 Februari 2019

bertujuan untuk memberantas perbudakan di Mauritania. Program yang dilakukan Abolition Institute ini didukung dan didanai oleh Komite Asosiasi Senat AS, yaitu sebesar \$5 juta.²⁷ Mauritania dan AS memiliki hubungan yang baik, dimana AS adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Mauritania.²⁸ Selain itu, Mauritania juga menerima *trade benefit* melalui program African Growth and Opportunity Act (AGOA), namun pada tahun 2018 program ini dihentikan oleh AS karena melihat usaha Mauritania dalam menghapuskan perbudakan di negaranya tidak berhasil.²⁹

Dari pemaparan latar belakang di atas, hal yang akan diteliti oleh peneliti adalah alasan pemerintah Mauritania menolak aktivis anti perbudakan masuk ke negaranya, karena hal ini sangat bertolak belakang dengan komitmennya untuk menghapuskan perbudakan.

1.2. Rumusan Masalah

Mauritania merupakan salah satu negara dengan angka perbudakan tertinggi di dunia. Ada di posisi pertama di antara negara-negara Afrika Barat, posisi ke tiga di Afrika dan ke enam di dunia. Dari tahun 2014 sampai dengan 2016, berdasarkan data dari Global Slavery Index, angka perbudakan di Mauritania sempat menurun drastis. Namun kembali terjadi kenaikan di tahun 2018. Pemerintah Mauritania telah melakukan berbagai upaya dalam penghapusan perbudakan seperti merancang kebijakan tentang perbudakan dan juga ikut di dalam banyak perjanjian dan konvensi

27 U.S. Senate Approves \$5 Million Grant for Anti-Slavery Program in Mauritania. <http://www.stoppingslavery.org/>. diakses pada 23 Juli 2019

28 U.S. Relations with Mauritania. <https://www.state.gov/>. diakses 23 Juli 2019

29 U.S. to end trade benefit for Mauritania over forced labour. <https://agoa.info/>. Diakses 23 Juli 2019

internasional mengenai perbudakan. Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, sikap pemerintah Mauritania bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya pada para aktivis anti perbudakan yang hendak membantu penghapusan perbudakan di negaranya. Aktivis yang ditolak masuk ke Mauritania adalah para aktivis anti-perbudakan internasional ternama dan juga merupakan utusan dari Amerika Serikat. Selain menolak aktivis, Mauritania juga melarang aksi damai dan menangkap para aktivis.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Mengapa pemerintah Mauritania melakukan penolakan terhadap aktivis anti perbudakan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari tindakan pemerintah Mauritania melakukan penolakan terhadap aktivis anti perbudakan di negaranya.



1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Akademis: Sebagai referensi dalam studi hubungan internasional, untuk menjelaskan pada pembaca mengenai fenomena perbudakan yang hingga saat ini masih saja terjadi, memperkenalkan negara Mauritania dan isu-isu di Afrika dan penolakan terhadap gerakan anti perbudakan dan juga sebagai referensi dalam studi hubungan internasional.
2. Praktis: Untuk membantu berbagai pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu perbudakan,

1.6. Studi pustaka

Penelitian pertama *Constructing a Human Rights Campaign: Contemporary Slavery in Mauritania* oleh Andre Rutti. Membahas tentang perbudakan di masyarakat Mauritania yang digerakkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, politik, sosial dan agama. Rutti juga melihat bagaimana tindakan pemerintah Mauritania dalam menanggapi isu ini, seperti ikut dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan perbudakan, pembentukan kebijakan dalam negeri dan keterlibatannya dalam kerjasama kawasan dalam memberantasan *modern slavery* di negaranya. Didalam penelitian ini juga dijelaskan tentang perbudakan turun temurun yang terjadi di Mauritania dan bagaimana budak dianggap layaknya sebuah barang bagi tuannya.³⁰

³⁰ Andre Rutti. *Constructing a Human Rights Campaign: Contemporary Slavery in Mauritania*. *Global Societies Journal*, 5. 2017

Penelitian kedua oleh Endah Artika Noerilita dan Saiman Pakpahan yang berjudul Peran Walk Free Foundation (WFF) dalam Mengatasi Modern Slavery di Mauritania. Membahas peran Walk Free Foundation (WFF) dalam menangani *modern slavery* di Mauritania. Peneliti menjelaskan tentang bagaimana berlangsungnya perbudakan di Mauritania yang bersifat turun temurun dari ibu ke anak dan begitu seterusnya. Dalam penelitian ini, peneliti juga menjelaskan berbagai kendala yang dialami WFF dalam menangani perbudakan modern di Mauritania, seperti kurangnya pengetahuan publik tentang bahaya perbudakan modern, kurangnya kapasitas sumber daya di Mauritania dan kurangnya pemantauan dan evaluasi pemerintah Mauritania menyebabkan korban perbudakan modern meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah dalam menangani perbudakan. Dari penelitian ini dapat dilihat beberapa upaya yang dilakukan oleh WFF seperti membuat laporan tahunan mengenai perbudakan yang bernama Global Slavery Index dan melakukan kampanye Global Walk free Movement.³¹

Penelitian ketiga berjudul Berakhirnya Romantisme Kolonial Prancis di Francophone Afrika oleh Kurniawati. Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk kolonialisme Perancis dan kemudian membandingkan bagaimana hubungan Prancis dan negara-negara jajahannya terutama di Afrika pada masa Perang Dingin dan Pasca Perang Dingin. Penelitian ini juga memaparkan bagaimana Perancis memperlakukan negara jajahannya dan ciri khas penjajahan Perancis. Ciri khas seperti keinginan Perancis untuk menyebarkan kebudayaannya yang dianggap lebih tinggi dari

31 Endah Artika Noerilita dan Saiman Pakpahan. Peran Walk Free Foundation (WFF) dalam Mengatasi Modern Slavery di Mauritania. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

kebudayaan negara yang dijajahnya. Penyebaran budaya Prancis yang paling terlihat adalah digunakannya bahasa Prancis sebagai bahasa resmi di negara-negara koloninya. Keinginan untuk menyebarkan peradabannya ini tidak berhenti sampai berakhirnya penjajahan tetapi tetap berlanjut hingga masa dekolonisasi. Perancis tetap berusaha mempertahankan hubungan patron-client dengan negara-negara eks-koloninya di Afrika yang disebut Francophone Afrika dengan memberikan bantuan terutama keuangan dan berbagai keistimewaan.³²

Penelitian keempat berjudul “Paradise Is Under the Feet of Your Master”: The Construction of the Religious Basis of Racial Slavery in the Mauritanian Arab-Berber Community oleh Khaled Esseissah. Memaparkan tentang konstruksi nilai-nilai agama para budak di Mauritania. Menjelaskan bagaimana pemerintah Mauritania menyalahkan perbudakan yang ada di dalam ajaran Islam dan hal itu dijadikan alasan untuk memperbudak masyarakatnya. Sehingga muncullah anggapan bagi para budak bahwa disaat seorang budak mengabdikan kepada sang tuan maka mereka menjalankan ajaran Islam dan surga ada di telapak kaki tuan.³³

Penelitian kelima berjudul Weapons of the weak, and of the strong: Mauritanian foreign policy and the international dimensions of social activism oleh Francisco Freire. Penelitian ini membahas tentang Artikel ini membahas tentang kebijakan luar negeri Republik Islam Mauritania dan pandangan internasional

32 Kurniawati. Berakhirnya Romantisme kolonial Perancis di Francophone Afrika. Dosen Sejarah FIS UNJ.

33 Khaled Esseissah. “Paradise Is Under the Feet of Your Master”: The Construction of the Religious Basis of Racial Slavery in the Mauritanian Arab-Berber Community. *Journal of Black Studies* 2016, Vol. 47(1) 3– 23. sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0021934715609915

mengenai aktivis sosial-politik di negaranya. Hal ini muncul karena adanya label Mauritania sebagai 'republik Islam', yang diadopsi setelah kemerdekaan pada tahun 1960, telah dimanfaatkan oleh negara untuk melegitimasi kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Penelitian ini juga menjelaskan bentuk-bentuk aktivisme sosial di Mauritania. Freire menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Mauritania berhubungan dengan perubahan agenda sosialnya tentang struktur sosial, aparat politik, dan sebutan resmi negara ini sebagai republik Islam.³⁴

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang akan dilakukan peneliti adalah peneliti akan meneliti alasan yang menyebabkan pemerintah Mauritania melakukan penolakan terhadap aktivis anti perbudakan yang masuk ke negaranya dan penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti mengenai peranan organisasi dalam pemberantasan *modern slavery*, perbandingan fenomena perbudakan, penyebab terjadinya perbudakan dan juga faktor yang menyebabkan adanya gerakan anti perbudakan di dalam masyarakat Mauritania.

1.7. Kerangka konseptual

Peneliti menggunakan teori Post-Colonialism untuk melakukan analisis terhadap alasan pemerintah Mauritania melakukan penolakan terhadap aktivis anti perbudakan ke negaranya. Hal ini didasari oleh Mauritania yang merupakan negara bekas jajahan Perancis. Sangat mungkin bahwa alasan pemerintah Mauritania melakukan penolakan ada kaitannya dengan trauma penjajahan dahulu. Di dalam

³⁴ Francisco Freire (2018): Weapons of the weak, and of the strong: Mauritanian foreign policy and the international dimensions of social activism, The Journal of North African Studies, DOI: 10.1080/13629387.2018.1454654

penelitian ini, peneliti akan menggunakan Post-Colonialism untuk menganalisis alasan Mauritania menolak aktivis anti perbudakan di negaranya.

1.7.1. Post-Colonialism

Kolonialisme atau penjajahan di masa lalu memang memiliki dampak yang sangat besar bagi negara-negara bekas jajahan. Afrika dan Asia adalah contoh wilayah-wilayah yang dahulunya adalah jajahan Eropa. Ada dua bentuk kolonialisme Eropa, yaitu *Extractive* dan *Settlement*. *Extractive* adalah model penjajahan dimana si negara penjajah hanya memanfaatkan dan mengambil sumber daya alam dari negara jajahannya dan mengeksploitasi ekonomi. Sedangkan *settlement* adalah model penjajahan dimana si negara penjajah bukan hanya mengambil sumber daya tapi juga melakukan okupasi, model penjajahan inilah yang digunakan oleh Perancis.³⁵

Perancis memiliki karakteristik tersendiri dalam melakukan penjajahan, dimana Perancis menyebarkan kebudayaannya yang dianggap lebih tinggi dari kebudayaan negara yang dijajahnya. Penyebaran budaya Prancis yang paling terlihat adalah digunakannya bahasa Perancis sebagai salah satu bahasa resmi di negara-negara koloninya.³⁶ Model penjajahan *settlement* yang dilakukan Perancis mewariskan bentuk kelembagaan yang lebih melindungi hak-hak pribadi. Post-kolonialisme merupakan teori atau kritikan terhadap literasi yang dibuat dalam bahasa Inggris di negara yang dahulunya negara penjajah atau masih menjajah.³⁷ Post-kolonialisme juga

³⁵ Liora Bigan dan Ambe J Njoh. Power and Social Control in Settler and Exploitation Colonies: The Experience of New France and France Colonial Africa. *Journal of Asian and African Studies* 2018, Vol. 53(6) 932–951. Hal 933

³⁶ Kurniawati. Berakhirnya Romantisme kolonial Perancis di Francephone Afrika. *Dosen Sejarah FIS UNJ*. Hal 1

³⁷ An Introduction to Post-Colonialism, Post-colonial Theory and Post-colonial Literature. Hal 1

membahas tentang pertemuan budaya negara penjajah dengan budaya negara yang dijajah.³⁸ Selain itu juga membahas tentang pandangan barat ke timur, yang dapat dijelaskan dengan konsep *otherness*.

1.7.2. *Colonial Legacy*

Colonial legacy adalah gabungan dari struktur politik, budaya dan pemerintahan yang ditinggalkan oleh administrator kolonial kepada negara-negara di Afrika yang memengaruhi Afrika pada pasca kemerdekaan dan masih berdampak pada negara dan politik Afrika kontemporer.³⁹ Sehingga penguasa negara pasca penjajahan akan menjalankan pemerintahan negaranya sesuai keinginannya, seolah negara tersebut adalah properti pribadi yang bisa dikendalikan hal ini disebabkan oleh adanya warisan penjajahan yang ditinggalkan oleh si negara penjajahan. Pasca-kolonialisme merupakan proses berkelanjutan dari praktik penindasan imperialisme. Contohnya adalah praktik perbudakan, pemindahan paksa, penindasan dan diskriminasi rasial, budaya dan gender.



³⁸ An Introduction to Post-Colonialism. Hal 1

³⁹ Joy Asongazoh Alemazung, Ph.D. Post-Colonial Colonialism: An Analysis of International Factors and Actors Marring African Socio-Economic and Political Development. Hochschule Bremen (University of Applied Sciences). School of International Business. Bremen, Germany. Hal 64

1.7.2.1. Pembagian etnis (*ethnic division*)

Salah satu hal yang dilakukan oleh si penjajah adalah membatasi pergerakan antar etnis di negara jajahannya. Kekuatan koloni Perancis mampu memisahkan kelompok-kelompok etnis di Afrika, kelompok-kelompok tersebut di batas satu sama lain dan bahkan memisah-misahkan kelompok yang awalnya bersatu.⁴⁰ Hal ini dilakukan agar kelompok-kelompok etnis tidak bersatu dan tidak melakukan perlawanan. Akibatnya kelompok-kelompok tersebut semakin berjauhan dan menciptakan suatu tingkatan dan persaingan antar kelompok.⁴¹

Pemisahan etnis ini berdampak bagi negara yang dijajah, akhirnya akan membangun strata sosial dimana akan ada kelompok etnis yang menjadi bawahan yang lainnya dan juga berdampak terhadap terbentuknya *cultural division of labour*. *Cultural division of labour* adalah bentuk diskriminasi sosial yang memungkinkan adanya kelompok atau individu untuk menjalankan suatu peran atau bekerja sesuai dengan budayanya.⁴² Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab terbentuknya strata tuan dan budak dan juga menyebabkan adanya kelompok yang termarginalkan akan merasa berbeda dari kelompok lain.

⁴⁰ Blanton, Mason & Athow. Colonial Style and Post-Colonial Ethnic. Hal 480

⁴¹ Alemazung. Post Colonial Colonialism. Hal 65

⁴² Blanton, Mason & Athow. Colonial Style. Hal 475

1.7.2.2. Warisan Politik (*Political Legacy*)

Bentuk utama dari *political legacy* adalah pergantian dari elit Eropa ke Elit Afrika yang berpendidikan Eropa. Pergantian ini dilakukan dengan kepercayaan kolonial, maksudnya ada yang meyakini bahwa sistem dan tatanan politik yang berjalan pada masa penjajahan masih layak digunakan. Negara bekas jajahan Perancis di Afrika mengadaptasi sistem sentralisasi, hal ini menyebabkan pemerintahan di beberapa negara Afrika menjadi otoriter dan didasari oleh etnis.⁴³ Warisan politik yang ditinggalkan juga bisa seperti kontrol hirarkis dan paksaan, terutama paksaan untuk tidak melakukan oposisi politik.⁴⁴ Pasca kemerdekaan dari Eropa banyak negara-negara Afrika yang mewarisi budaya korupsi, selain itu sistem politik yang digunakan masih berdasarkan etnis dan masih terjadi marginalisasi.⁴⁵

1.7.3. *Otherness*

Konsep *other* pertama kali diperkenalkan oleh Simone de Beauvoir. Ia memperkenalkan *other, othering dan otherness* sebagai lawan dari *the self*. De Beauvoir banyak terinspirasi dari tulisan karya Hegel yang berjudul “Slave-Master Dialectic”. Hegel menuliskan bahwa *other* adalah bentuk penentangan terhadap apa yang disebut *self*.⁴⁶ Di dalam tulisannya, Hegel menjelaskan dialektik *master-slave* dalam sebuah dongeng, dimana ia menceritakan ada 2 orang yang sedang mencari

43 Endalcachew Bayeh. The Political and Economic Legacy of Colonialism in the Post-Independence African States. Department of Civics and Ethical Studies, College of Social Sciences and Humanities, Ambo University, Ambo, Ethiopia. Hal 90

44 Colonial Legacies in Ghana. Hal 7

45 Bayeh. The Political and Economic Legacy. Hal 90

46 Lajos Brons. Othering, the Analysis. Hal 69

self-consciousness bertarung hingga mati, jika salah satu pihak menyerah, maka ia akan menjadi budak bagi yang lainnya.⁴⁷

Proses identifikasi dan problematisasi Frantz Fanon mengenai individu yang terjajah akan berubah menjadi sosok yang *non-human* karena disebabkan oleh penjajah masih dijadikan sebagai acuan dalam penelitian mengenai identitas dan ras. Di dalam karya-karyanya Frantz Fanon memiliki gagasan mengenai *color* dan *coloring*, dimana gagasan-gagasan ini harus di tambah dengan cara menginvestigasi nilai-nilai yang ada pada setiap *color* dan juga mencari tahu tujuan utama dan persepsi yang ada di dalam *coloring* itu sendiri. Identitas yang dimiliki seseorang baru dapat dikenali saat satu pihak dihadapkan dengan perbedaannya. Perbedaan ini dapat dilihat dari cara berbicara, bahasa tubuh dan *gesture*. Setelah melihat adanya perbedaan tersebut, maka individu akan mendekripsikan, mempercayai dan menyadari bahwa ada *the other*. Situasi seperti ini pada masa kolonial bisa membuat si penjajah yang merasa berbeda dengan orang-orang yang dijajahnya melakukan pengasingan terhadap pihak yang terjajah melalui struktur hubungan yang ketergantungan, begitulah cara penjajah eropa membentuk *other* mereka.⁴⁸

Frantz Fanon berpendapat bahwa bentuk pengasingan pada masa penjajahan sangat intense sehingga mampu mereduksi pihak yang dijajah menjadi *non-human*. Tujuan dari pengasingan ini adalah untuk mengubah yang dijajah dari objek penjajah

⁴⁷ Biok Behnam, Farhad Azimi & Alireza Baghban Kanani. Slave-master Relationship and Post-colonial Translation and Teaching. *Journal of Language Teaching and Research*, Vol. 8, No. 3, pp. 565-570, May 2017. Hal 566

⁴⁸ Anthony Peter Spanakos. The Canvas of the Other: Fanon and Recognition. University of Massachusetts-Amherst DOI: <https://doi.org/10.13023/DISCLOSURE.07.11>. *disClosure: A Journal of Social Theory*. Volume 7 (Coloring), Article 11. Hal 146

menjadi subjek bagi sistemnya sendiri. Ontologi Fanon terinspirasi dari konsepsi Marxis mengenai *alienation* (keterasingan) dan gagasan Hegel tentang *recognition* (pengakuan).⁴⁹

Konsep *otherness* juga dijelaskan oleh Edward Said melalui karyanya yang terkenal yang berjudul *Orientalism*. Didalam tulisannya Said membahas tentang konstruksi pikiran barat terhadap timur. Barat disebut *occident* dan barat disebut *orient*.⁵⁰ *Occident* adalah *the self* dan *orient* adalah *the other*. Menurut Said pandangan barat terhadap timur hanya berdasarkan fantasi, sehingga menciptakan *stereotype* tertentu mengenai timur.⁵¹ Para penjelajah, penyair, novelis dan filsuf dan para penteoris barat telah membentuk citra yang buruk mengenai negara-negara timur.⁵² Banyaknya anggapan bahwa timur dianggap primitif, tidak beradab dan sangat kontras dengan yang terjadi di barat, dimana barat maju dan beradab. Bangsa barat menggunakan bahasa dan budaya agar dapat mengenyampingkan budaya, sejarah, nilai-nilai dan bahasa masyarakat oriental dan agar dapat mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki timur dengan dalih untuk mencerahkan, membudayakan dan memanusiakan.⁵³ Said melihat bagaimana pandangan tentang timur dipermainkan oleh barat, dimana barat membiarkan *stereotype* mengenai timur terus berkembang dan

49 Spanakos. *The Canvas of the Other*. Hal 146

50 Datta G. Sawant. *Perspective on Post-Colonial Theory: Said, Spivak and Bhabha*. TACS College, Sengaon. Hal 2

51 Ambesange Praveen V. *Postcolonialism: Edward Said & Gayatri Spivak*. *Research Journal of Recent Sciences* Vol. 5(8), 47-50, August (2016). Hal 48

52 Lutfi Hamadi, PhD. *Edward Said: The Postcolonial Theory And The Literature Of Decolonization*. Lebanese International University. *European Scientific Journal* June 2014 /SPECIAL/ edition vol.2. Hal 40

53 Hamadi. *Edward Said*. Hal 40

diakui menjadi fakta dengan sendirinya, sehingga hal ini dijadikan alasan untuk melakukan imperialisme politik dan ekonomi di timur.⁵⁴

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis alasan pemerintah Mauritania menolak aktivis anti perbudakan yang masuk ke negaranya menggunakan pendekatan Post-kolonialisme yang akan lebih menggunakan konsep *otherness* dan juga *colonial legacy*.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan alasan mengapa pemerintah Mauritania menolak masuknya aktivis anti perbudakan ke negaranya. Karena metode ini dapat menjelaskan masalah dengan lengkap, metode ini adalah metode dengan melakukan identifikasi permasalahan dengan menjelaskan sebab dan akibat suatu isu dapat terjadi. Metode ini akan menjelaskan tentang unit analisis dan unit eksplanasi yang diteliti. Metode ini dapat menjelaskan terjadinya sebab dan akibat terjadinya suatu isu dengan lebih rinci dibandingkan metode penelitian lainnya, dimana metode kualitatif dapat memaparkan sebab akibat pemerintah Mauritania menolak masuknya aktivis anti perbudakan ke Mauritania.

⁵⁴ Behnam, Azimi & Kanani. Slave-master Relationship and Post-colonial Translation and Teaching. *Journal of Language Teaching and Research*, Vol. 8, No. 3, pp. 565-570, May 2017. Hal 566

1.8.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah alasan pemerintah Mauritania melakukan penolakan terhadap aktivis anti perbudakan ke negaranya. Batasan waktu yang digunakan peneliti adalah tahun 2016 sampai dengan 2018. Ini disebabkan karena pada tahun tersebut Mauritania banyak melakukan intimidasi, penolakan dan juga menuntut para aktivis anti perbudakan baik domestik maupun internasional yang hendak melakukan aksi damai. Di tahun tersebut juga ada beberapa aktivis domestik yang mendapat pembelaan dari pihak-pihak penting seperti Amnesty International dan African Union dan juga penolakan terhadap aktivis anti perbudakan internasional yang hendak masuk tidak memiliki alasan yang jelas, padahal para delegasi aktivis sudah menjalankan kunjungan sesuai aturannya. Dan di tahun tersebut, angka perbudakan di Mauritania yang sempat turun di tahun 2016 menjadi 43.000 dari angka 150.000, namun kembali meningkat drastis di tahun 2018.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian ini, unit analisis yang akan diteliti adalah Mauritania dan unit eksplanasinya adalah aktivis anti perbudakan internasional. Level analisis adalah level negara, karena yang akan lebih dianalisis dalam penelitian ini adalah sikap pemerintah Mauritania terhadap aktivis anti perbudakan.

1.8.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari website

resmi beberapa NGO yang ditolak masuk oleh Mauritania seperti website dari Amnesty Internasional dan Abolition Institute. Selain itu peneliti juga mendapatkan data primer dari hasil wawancara dengan pihak Abolition Institute di Chicago melalui e-mail, bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dapat memenuhi data pendukung penelitian ini. Wawancara ini berisikan pertanyaan mengenai penolakan pemerintah Mauritania terhadap Abolition Institute di tahun 2017.

Peneliti juga menggunakan data sekunder, yang bersumber dari dokumen berupa jurnal hasil penelitian yang mendukung penelitian, buku-buku dan berbagai publikasi resmi pihak-pihak tertentu seperti laporan Global Slavery Index, Amnesty International dan Trafficking in Person Department of State Amerika Serikat. Peneliti menggunakan sumber-sumber yang berisikan fakta-fakta yang dapat mendukung penelitian dari berbagai sumber di internet, seperti situs berita dan pengetahuan umum. Dalam melakukan pengumpulan data melalui internet, peneliti menggunakan *search engine* google. Dengan keyword yang digunakan adalah *Mauritania, Modern Slavery, France Colonialism, Mauritania denied anti-slavery activist, anti-slavery activist, France colonialism legacy, ethnic division, otherness*.

1.8.5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Ada 4 tahapan dalam melakukan analisis data⁵⁵:

1. Pengumpulan Data

Hal pertama yang harus dilakukan dalam analisis data adalah pengumpulan berbagai dokumen atau sumber lainnya berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan dengan pencarian data lainnya. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang didapatkan dari pencarian menggunakan *search engine* Google dan juga dari hasil wawancara.

2. Reduksi Data

Suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Dari hasil pengumpulan data, peneliti akan memilih data yang memang berguna dan dapat mendukung penelitian. Seperti contohnya tentang model penjajahan Inggris dan Perancis, maka peneliti akan menggunakan data yang terfokus pada penjajahan Perancis, karena lebih mendukung penelitian.

⁵⁵Matthew B. Miles, A. Michael Huberman and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook Edition*

3. Penyajian Data

Adalah proses menemukan hal-hal yang penting dari yang telah diteliti dan memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan. Data yang disajikan merupakan data hasil reduksi yang disusun secara akademis. Data yang disajikan harus dapat dimengerti. Pada tahap ini peneliti akan menggunakan data yang sebelumnya sudah direduksi. Seperti mengenai bentuk perbudakan di Mauritania, faktor yang mempengaruhi masih terjadinya perbudakan di Mauritania, colonial legacy di Mauritania dan lain-lain.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Kesimpulan yang diambil harus terverifikasi dan dapat diuji keabsahannya. Kesimpulan dapat ditarik melihat dari data-data yang telah dikumpulkan dan juga bisa dari hasil diskusi yang dilakukan si peneliti. Peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan aktivitas aktivis anti perbudakan, penolakan aktivis anti perbudakan di Mauritania dan Alasan pemerintah melakukan penolakan terhadap para aktivis tersebut. Lalu memilih data yang mana saja yang dirasa cocok dan dapat menjawab pertanyaan peneliti. Setelah itu peneliti akan menyajikan data-data tersebut dan akhirnya akan menyimpulkan dan memverifikasi data-data yang sudah didapat.

Sehingga pada tahap akhir analisis peneliti akan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berupa jawaban dari pertanyaan

penelitian. Dimana pada penelitian ini pertanyaan penelitian peneliti adalah “mengapa Mauritania menolak masuknya aktivis anti-perbudakan ke negaranya?” maka kesimpulan akan berisikan jawaban dari pertanyaan dan temuan-temuan lainnya.

1.9. Sistematika Penelitian

Bab I: Pendahuluan

Di bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual dan metode penelitian dan pengolahan data.

Bab II: Perbudakan di Mauritania dan Respon Pemerintah Mauritania

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan bentuk-bentuk praktik perbudakan di Mauritania dan penyebab masih terjadinya praktik perbudakan di Mauritania dan bagaimana respon Mauritania terhadap fenomena perbudakan tersebut dan upaya penghapusannya.

Bab III: Penolakan Aktivis Anti Perbudakan di Mauritania

Pada bab ini peneliti akan memaparkan profil NGO dan para aktivis, program yang hendak dilakukan para aktivis di Mauritania dan penolakan yang dilakukan oleh Mauritania. Pada bab ini, peneliti juga akan memaparkan data mengenai jurnalis dan peneliti yang diusir dari Mauritania dan juga sikap pemerintah Mauritania terhadap aktivis anti-perbudakan domestik.

Bab IV: Analisis Alasan Mauritania Melakukan Penolakan terhadap Aktivis Anti Perbudakan.

Di bab ini peneliti akan melakukan analisis alasan Mauritania menolak masuknya aktivis anti perbudakan ke negaranya dengan menggunakan *colonial legacy* dan *otherness* dan bukti-bukti dari bab-bab sebelumnya.

Bab V: Kesimpulan

Pada bab ini peneliti akan menuliskan kesimpulan dan hasil dari penelitian peneliti dan juga saran.

